UNIVERSITAS GADJAH MADA
Analisis Yuridis Akta Jual Beli yang Disertai Akta Pengakuan Utang Atas Sisa Pembayaran dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Akta Nomor 36/2025 dan Akta Pengakuan Utang Nomor 5 yang Dibuat Notaris/PPAT X di Kota Yogyakarta)
WAH IDNA AMINUDIN, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, H. (2009). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.

————. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana FH Universitas Indonesia.

Al Rasyid, H. (1987). *Sekilas Tentang Akta Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-12. Jakarta: Sinar Grafika.

Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.

Arba, H. M. (2018). *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi ke-5. Jakarta: Sinar Grafika.

Fajar N. D., M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Edisi ke-5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harahap, M. Y. (2006). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi ke-5. Jakarta: Sinar Grafika.

Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* Edisi ke-12. Jakarta: Djambatan.

Ismail, N. (2024). *Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Teori dan Praktik.* Edisi ke-1. Malang: Setara Press.

Jurdi, F. (2017). *Logika Hukum*, Edisi ke-1. Jakarta: Kencana.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Analisis Yuridis Akta Jual Beli yang Disertai Akta Pengakuan Utang Atas Sisa Pembayaran dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Akta Nomor 36/2025 dan Akta Pengakuan Utang Nomor 5 yang Dibuat Notaris/PPAT X di Kota Yogyakarta)
WAH IDNA AMINUDIN, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. (1975). *Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Lumban Tobing, G. H. S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum* Edisi ke-9. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

———————. (2014). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2024). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Edisi ke-3. Depok: Rajawali Pers.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Perangin, E. (1989). *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi*. Jakarta: Rajawali.

Ridwan, H. R. (2014). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Salim, H. S. (2019). *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Depok: Raja Grafindo Persada.

————— . & Nurbaini, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Edisi ke-1. Jakarta: Kencana.

——— . (2013). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Analisis Yuridis Akta Jual Beli yang Disertai Akta Pengakuan Utang Atas Sisa Pembayaran dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Akta Nomor 36/2025 dan Akta Pengakuan Utang Nomor 5 yang Dibuat Notaris/PPAT X di Kota Yogyakarta)
WAH IDNA AMINUDIN, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sofwan, S. S. M. (2000). *Hukum Perdata: Hukum Benda* Edisi ke-5. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Subekti, R. (1975). *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata* Edisi ke-11. Jakarta: PT Intermasa.

———. (1995). *Aneka Perjanjian* Edisi ke-10. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

———. Tjitrosudibio, R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumardjono, M. S. W. (2014). *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

———. (2019). *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

———. (2020). *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Sutedi, A. (2006). *Kekuatan Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Jakarta: BP Cipta Jaya.

Tan, T. K. (2011). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ter Haar Bzn, B. (2013). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Pesponoto, Edisi ke-14. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Analisis Yuridis Akta Jual Beli yang Disertai Akta Pengakuan Utang Atas Sisa Pembayaran dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Akta Nomor 36/2025 dan Akta Pengakuan Utang Nomor 5 yang Dibuat Notaris/PPAT X di Kota Yogyakarta)
WAH IDNA AMINUDIN, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 569)

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83)

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional/Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 8 Tahun 2012

C. Artikel Jurnal, Karya Ilmiah (Tesis/Disertasi)

Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Analisis Yuridis Akta Jual Beli yang Disertai Akta Pengakuan Utang Atas Sisa Pembayaran dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Akta Nomor 36/2025 dan Akta Pengakuan Utang Nomor 5 yang Dibuat Notaris/PPAT X di Kota Yogyakarta)
WAH IDNA AMINUDIN, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Jurnal Bina Mulia Hukum, *6*(1), 130–140. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324

Chandra, I. D., & Lukman, A. (2022). *Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 303/Pdt.G/2020/Pn.Kpg)*. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, *6*(1), 65–80. https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1058

Herinawati, Devia. (2022). *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Karena Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 217/Pdt/PT.Smg)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Linati, A. (2022). *Kuasa Menjual Dengan Kausa Pengakuan Utang Sebagai Dasar Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1416K/PDT/2020)*. *Indonesian Notary*, *4*(1).

Prawira, I. G. B. Y. (2016). *Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah*. *IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *4*(1), 66.

Saputro, A. P., & Huda, M. (2024). *Kepastian Hukum Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pembayaran Harga Tanah Yang Belum Dilunasi Pembeli*. *Collegium Studiosum Journal*, *7*(2), 374–380. https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1310

Sulaemaniyah, N., & Umami, A. M. (2024). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Berdasarkan Putusan MA Nomor 3753 K/Pdt/2020*. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, *4*(1).

Suraningsih. (2017). *Pembatalan Akta PPAT Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 95/Pdt.G/2009/PN.Klt Di Pengadilan Negeri Klaten)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Sumardjono, M. S. W. (1993). *Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA*. *Majalah Mimbar Hukum*.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Yuridis Akta Jual Beli yang Disertai Akta Pengakuan Utang Atas Sisa Pembayaran dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Akta Nomor 36/2025 dan Akta Pengakuan Utang Nomor 5 yang Dibuat Notaris/PPAT X di Kota Yogyakarta)
WAH IDNA AMINUDIN, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Susanto, M. S. H. (2025). *Analisis Keabsahan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Dilakukan Pembayaran Lunas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2496/K/Pdt/2022)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.